

Peran Ganda Perempuan, Ekologi Ruang, dan Kuasa Struktural dalam Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Hidayah Rahman¹, Ashmarita², Hasniah³, Ahmat Keke⁴, Puspitasari⁵

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: hidayah.rahmann@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	28-08-2026
Disetujui	14-09-2026
Diterbitkan	21-09-2026

ABSTRACT

This study explores how women in Bontomanai and Labbakkang Villages, Pangkep Regency, South Sulawesi, take part in seaweed farming, and how settlement location, wage relations, and gender-based division of labor jointly shape the economy of coastal households. An ethnographic, qualitative method was applied, combining participant observation, in-depth interviews, and field documentation of women seaweed cultivators and processors. Findings reveal that coastal women carry a double burden, running household duties alongside active work in seeding, tying, sun-drying, and processing seaweed. Involvement patterns, however, are not uniform: women living in hamlets directly facing the sea (Binangatoa/Tanarajae) take part across the whole production cycle through a paid mutual-help (gotong royong) arrangement, whereas women in hamlets set further back from the shoreline (Kabirisi) are confined to seed-tying within an informal, broker-mediated labor market involving wage deductions. Drawing on Julian Steward's cultural ecology and Eric Wolf's notion of structural power, the study shows that ecological location is not a neutral backdrop but an active force shaping economic access and women's bargaining strength. Economically, women's earnings prove vital, at times becoming the main pillar, for fishing households whose incomes fluctuate. The study concludes that the long-standing domestic-public dichotomy applied to coastal women deserves reconsideration, since Pangkep women in practice occupy a central, not merely auxiliary, place within the local seaweed value chain.

Keywords: Women's Double Burden; Coastal Economy; Cultural Ecology; Seaweed; Economic Anthropology.

ABSTRAK

Kajian ini menelusuri keterlibatan perempuan dalam rangkaian kegiatan budidaya rumput laut di Desa Bontomanai dan Desa Labbakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, serta menelaah bagaimana letak permukiman, relasi kuasa dalam sistem pengupahan, dan pembagian kerja berbasis gender bersama-sama membentuk perekonomian rumah tangga pesisir. Pendekatan kualitatif-etnografis diterapkan melalui pengamatan terlibat serta, wawancara mendalam, dan pendokumentasian terhadap perempuan petani sekaligus buruh pengolah rumput laut. Temuan memperlihatkan bahwa perempuan pesisir menanggung peran ganda, yakni menuntaskan pekerjaan rumah tangga sekaligus aktif dalam pembibitan, pengikatan, penjemuran, dan pengolahan rumput laut. Pola keterlibatan itu ternyata tidak sama antarwilayah: perempuan yang bermukim di dusun yang berhadapan langsung dengan laut (Binangatoa/Tanarajae) berpartisipasi dalam seluruh tahapan produksi melalui skema gotong royong berupah, sementara perempuan di dusun yang letaknya lebih menjauh dari pantai (Kabirisi) hanya dilibatkan pada tahap pengikatan bibit melalui pasar kerja informal yang melibatkan makelar dan potongan upah. Dengan memakai kerangka ekologi budaya Julian

Steward dan gagasan kuasa struktural Eric Wolf, kajian ini memperlihatkan bahwa posisi ekologis bukan sekadar latar geografis, melainkan turut menentukan akses ekonomi dan daya tawar perempuan. Secara ekonomi, sumbangan perempuan terbukti penting, bahkan pada beberapa kasus menjadi penopang utama, bagi rumah tangga nelayan yang penghasilannya tidak menentu. Kajian ini menyimpulkan bahwa dikotomi domestik-publik yang selama ini disematkan pada perempuan pesisir perlu ditinjau ulang, sebab perempuan Pangkep pada kenyataannya menempati posisi sentral, bukan sekadar pelengkap, dalam rantai nilai rumput laut setempat.

Kata Kunci: Peran Ganda Perempuan; Ekonomi Pesisir; Ekologi Budaya; Rumput Laut; Antropologi Ekonomi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahman, H., Ashmarita, A., Hasniah, H., Keke, A., & Puspitasari, P. (2026). Peran Ganda Perempuan, Ekologi Ruang, dan Kuasa Struktural dalam Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 610-618. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8442>

PENDAHULUAN

Industri rumput laut menempati posisi strategis dalam perdagangan hasil laut internasional. Data yang dihimpun oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperlihatkan bahwa komoditas ini menyumbang bagian yang cukup besar terhadap nilai ekonomi produk perikanan global, seiring meningkatnya kebutuhan pasar atas produk turunan seperti karaginan dan agar-agar yang banyak dipakai pada industri makanan, obat-obatan, dan kosmetik (FAO, 2020). Selain nilai ekonominya yang besar, budidaya rumput laut juga tergolong usaha yang relatif mudah diadopsi oleh masyarakat pesisir karena tidak membutuhkan modal besar, teknologi rumit, maupun lahan daratan yang luas, sehingga menjadikannya salah satu sumber penghidupan andalan bagi rumah tangga nelayan di banyak wilayah kepulauan. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu produsen rumput laut utama dunia, dengan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu wilayah sentra produksi berkat garis pantainya yang panjang dan gugusan pulau kecil yang sesuai untuk usaha budidaya laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Meskipun capaian produksi rumput laut kerap ditonjolkan dalam laporan statistik perikanan, tenaga kerja yang menopang capaian tersebut jarang mendapat sorotan yang setara, terutama tenaga kerja perempuan pesisir. Berbagai kajian terdahulu memperlihatkan bahwa perempuan di sentra-sentra penghasil rumput laut tidak hanya berperan pada tahap budidaya, tetapi juga aktif dalam pengolahan pascapanen dan penjualan hasil (Ischak, 2019; Tahir & Hasmidar, 2021). Sayangnya, peran tersebut lebih sering diposisikan sebagai kerja bantu atau pelengkap ketimbang sebagai unsur produksi yang setara pentingnya dengan kerja laki-laki di laut. Literatur ekonomi kelautan pada umumnya lebih banyak membahas volume produksi, fluktuasi harga, dan efisiensi rantai pasok, sementara struktur sosial-gender yang menyangga keberlangsungan produksi itu sendiri jarang dibedah secara mendalam. Kesenjangan ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan kajian pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor informal pesisir, yang belakangan mulai mendapat perhatian, misalnya melalui pendekatan kelembagaan seperti koperasi (Sasora et al., 2025), namun belum banyak menyentuh dinamika ekologis yang membentuk pola kerja perempuan itu sendiri.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini disusun berdasarkan penelitian etnografis yang dilaksanakan di Desa Bontomanai dan Desa Labakkang, Kabupaten Pangkep. Dua isu pokok menjadi perhatian utama. Pertama, bagaimana perempuan menjalankan berbagai peran dalam rangkaian budidaya rumput laut, mulai dari pembibitan hingga pengolahan akhir, di tengah beban tanggung jawab rumah tangga yang tetap harus mereka penuhi. Kedua, sejauh mana keterlibatan tersebut memberi dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga di kawasan pesisir. Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan mengingat rumah tangga nelayan umumnya menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat faktor cuaca, musim tangkap, dan fluktuasi harga komoditas laut, sehingga kontribusi ekonomi anggota keluarga di luar kepala rumah tangga—dalam hal ini perempuan—menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam memahami ketahanan ekonomi keluarga pesisir secara utuh.

Kebaruan yang ditawarkan artikel ini terletak pada temuan bahwa keterlibatan perempuan dalam siklus produksi rumput laut ternyata tidak seragam antarwilayah, melainkan sangat dipengaruhi oleh letak permukiman terhadap garis pantai—sebuah variabel ekologis yang sejauh penelusuran kami belum banyak diangkat secara eksplisit dalam literatur gender dan ekonomi pesisir di Indonesia. Perbedaan posisi ekologis semacam ini pada akhirnya melahirkan dua corak kerja yang berlainan: di satu sisi terdapat sistem gotong royong berupah pada kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, dan di sisi lain muncul pasar tenaga kerja informal yang melibatkan makelar pada kawasan yang posisinya lebih menjauh dari pantai. Dengan

menelusuri kedua pola ini secara berdampingan, artikel ini berupaya memperlihatkan bahwa jarak geografis bukan sekadar fakta spasial yang netral, melainkan turut menentukan besar-kecilnya akses ekonomi serta kekuatan tawar perempuan dalam rantai produksi.

Untuk membedah persoalan tersebut, temuan lapangan dalam artikel ini didialogkan dengan sejumlah kerangka antropologi ekonomi dan antropologi feminis. Gagasan dikotomi domestik-publik dari Rosaldo (1974) digunakan untuk melihat bagaimana ranah kerja perempuan dan laki-laki diberi nilai yang berbeda secara struktural, sementara kritik Sherry Ortner (1972) atas asosiasi perempuan dengan “alam” dipakai untuk menelaah bagaimana kerja produktif perempuan kerap direduksi nilainya. Selain itu, ekologi budaya Julian Steward (1955) serta konsep kuasa struktural yang dikembangkan Eric Wolf (1982) digunakan untuk menjelaskan bagaimana posisi ekologis suatu permukiman dapat berkonversi menjadi perbedaan struktur kerja dan kuasa ekonomi. Melalui perpaduan kerangka ini, artikel ini hendak menegaskan bahwa ekonomi keluarga pesisir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pengalokasian tenaga kerja secara rasional, melainkan juga sebagai arena tempat ruang, gender, dan kuasa saling bernegosiasi.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif melalui desain etnografi, merujuk pada (Spradley, 1997) yang menempatkan pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan pendokumentasian sebagai tiga cara utama dalam menghimpun data etnografis. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yakni di Desa Bontomanai dan Desa Labbakkang, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, dengan pertimbangan bahwa kedua desa ini memiliki dusun-dusun yang letaknya kontras terhadap garis pantai, sehingga memungkinkan perbandingan pola keterlibatan perempuan secara langsung antarwilayah.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dari bulan Agustus 2025 sampai dengan Maret 2026. Penentuan informan dilakukan secara purposif, mengikuti kriteria Spradley (1997) bahwa informan yang tepat adalah mereka yang benar-benar memahami persoalan yang diteliti secara mendalam. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang. Informan dalam penelitian ini mencakup perempuan yang berprofesi sebagai petani sekaligus buruh pengolah rumput laut, agen kecil pengolah rumput laut, serta pihak pemerintah desa dan pemilik usaha rumput laut setempat. Pengamatan langsung dilakukan untuk merekam aktivitas harian perempuan dalam siklus budidaya rumput laut beserta kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan mengacu pada teknik yang dikemukakan Ardiansyah et al., (2023) guna menggali sudut pandang, pengalaman, dan persepsi informan secara langsung, sedangkan dokumentasi visual (Noor, 2011) dipakai sebagai data pendukung untuk merekam aktivitas kerja di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif dengan mengadaptasi model Miles & Huberman (2009) yang mencakup empat tahapan yang berlangsung beriringan: pengumpulan data lapangan secara deskriptif dan reflektif, reduksi data melalui pemilahan dan pengorganisasian informasi, penyajian data dalam bentuk matriks tematik, serta penarikan simpulan yang terus diverifikasi ulang untuk menjaga validitas interpretasi yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ganda Perempuan: Menyeimbangkan Waktu Domestik dan Produksi

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa perempuan pengolah rumput laut menjalani rutinitas harian dengan jadwal yang cukup ketat. Informan seperti Ibu Mala, Ibu Nimang, dan Ibu Sawina menuturkan pola kerja yang hampir seragam: pukul 06.00 hingga 09.00 pagi digunakan untuk merampungkan pekerjaan rumah tangga—mencuci pakaian, membersihkan rumah, berbelanja kebutuhan dapur, dan memasak—sebelum mereka beralih mengolah rumput laut hingga sore hari sekitar pukul 17.00. Sesampainya di rumah, tanggung jawab domestik kembali harus dijalankan, mulai dari mendampingi anak belajar hingga menuntaskan urusan rumah tangga lainnya. Pola semacam ini menunjukkan bahwa waktu bagi perempuan pesisir bukanlah sumber daya yang bebas nilai, melainkan medan yang harus mereka atur secara disiplin di antara dua tuntutan yang berjalan bersamaan.



Gambar 1. Proses Pengikatan Bibit Rumput Laut yang Dilakukan oleh Ibu-Ibu Nelayan Rumput Laut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti (2026)

Dorongan ekonomi di balik keterlibatan ini pada umumnya muncul dari terbatasnya penghasilan suami. Beberapa informan menyampaikan bahwa suami mereka tidak pernah secara eksplisit meminta istri untuk turut mencari nafkah, tetapi pendapatan sebagai nelayan atau buruh bangunan pada kenyataannya tidak cukup untuk menutup kebutuhan harian keluarga. Kasus Ibu Inang (37 tahun), yang berperan sebagai agen kecil pengolah rumput laut dengan membawahi tujuh buruh perempuan, serta Ibu Rina (49 tahun), yang mengelola sembilan buruh dan sekaligus menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga setelah suaminya berhenti bekerja, memperlihatkan bahwa perempuan tidak sekadar menjadi buruh, melainkan juga pengelola usaha berskala kecil dalam rantai nilai rumput laut. Dari sisi hitungan ekonomi, harga beli rumput laut mentah oleh agen kecil berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram, yang setelah melalui proses pengolahan dijual kembali kepada agen besar dengan harga sekitar Rp100.000 per kilogram. Dengan kapasitas olah harian berkisar 40 hingga 60 kilogram, seorang agen kecil berpotensi memperoleh pendapatan kotor harian hingga sekitar Rp2.500.000, sebelum dipotong biaya operasional dan upah buruh.

Bila dibaca melalui tesis Rosaldo (1974) tentang dikotomi domestik-publik, temuan ini memperlihatkan sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar pengulangan hierarki lama. Perempuan Pangkep

tetap memikul penuh tanggung jawab domestik—kondisi yang secara struktural masih mereplikasi pembagian kerja konvensional—namun pada saat bersamaan mereka juga tampil sebagai aktor ekonomi produktif yang ikut menentukan arah rantai nilai komoditas ekspor. Dalam bingkai pemikiran Ortner (1972) yang mengkritik asosiasi ideologis antara perempuan dan “alam” sehingga perempuan kerap dianggap kurang produktif secara kultural, praktik perempuan Pangkep justru memperlihatkan bentuk resistensi yang implisit: mereka mengolah sumber daya alam berupa rumput laut melalui keterampilan teknis dan jejaring usaha yang tertata rapi, sehingga kerja mereka tidak dapat sekadar direduksi sebagai kelanjutan alamiah dari peran reproduktif, melainkan setara pentingnya dengan kerja laki-laki di laut.

Ekologi Ruang dan Dua Corak Kerja: Dusun Binangatoa dan Dusun Kabirisi

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa pola keterlibatan perempuan dalam siklus budidaya rumput laut tidaklah seragam, tetapi sangat bergantung pada jarak dusun tempat tinggal terhadap garis pantai. Di Dusun Binangatoa, yang juga dikenal dengan nama Tanarajae dan berbatasan langsung dengan laut, perempuan terlibat pada seluruh tahapan produksi, mulai dari pembibitan, pengikatan, pengambilan hasil dari laut, hingga pengolahan pascapanen. Pekerjaan ini dijalankan melalui skema gotong royong, di mana warga saling bergiliran membantu proses pembibitan, pengikatan, sampai panen. Meskipun berlandaskan semangat kebersamaan, skema ini tetap mempertahankan sistem upah, dengan besaran sekitar Rp3.500 untuk setiap bentangan tali sepanjang 25 hingga 30 meter.



Gambar 2. Proses Penjemuran Rumput Laut yang Dilakukan oleh Ibu Nelayan Rumput Laut yang Bermukim pada Wilayah Dusun Binangatoa
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti (2026)

Kondisi yang berbeda ditemukan di Dusun Kabirisi, yang letaknya lebih jauh dari garis pantai. Perempuan di dusun ini hanya dilibatkan pada tahap pengikatan bibit, sementara proses penjemuran dan pemasaran hasil tidak mereka tangani secara langsung. Bibit yang mereka ikat berasal dari pemilik bibit di wilayah lain, yakni Kelurahan Maccinibaji, yang disalurkan melalui perantara atau makelar. Secara nominal, upah pengikatan bibit di Kabirisi justru lebih tinggi, yaitu Rp5.000 per bentangan tali, tetapi

dipotong Rp500 oleh pihak perantara sebagai komisi, sehingga upah bersih yang diterima pekerja pada akhirnya menjadi lebih rendah daripada yang tampak di permukaan.

Perbedaan struktural ini paling relevan dijelaskan melalui ekologi budaya Julian Steward (1955), yang menekankan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya turut membentuk “inti kebudayaan”, yaitu konfigurasi kelembagaan produksi dan pembagian kerja yang paling berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kedekatan Dusun Binangatoa dengan laut memberi ruang bagi penduduknya, termasuk perempuan, untuk mengembangkan bentuk kerja kolektif berbasis gotong royong yang tetap mempertahankan nilai kebersamaan sekaligus terikat pada mekanisme upah. Sebaliknya, jarak ekologis Dusun Kabirisi terhadap laut membuat keterlibatan perempuan di sana terfragmentasi menjadi satu segmen produksi saja dan sangat bergantung pada rantai perantara, sehingga relasi produksi yang terbentuk cenderung lebih bersifat transaksional dan rawan terhadap ekstraksi nilai oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, ruang ekologis dalam kasus ini tidak bisa dipandang sebagai latar yang netral, melainkan sebagai faktor aktif yang turut mengonfigurasi struktur ekonomi dan relasi gender. Semakin dekat suatu komunitas dengan sumber daya utama, dalam hal ini laut, semakin besar pula kendali kolektif yang dimiliki atas keseluruhan proses produksi, dan semakin adil pula distribusi nilai yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin jauh jarak ekologisnya, semakin besar pula kecenderungan terjadinya fragmentasi peran serta ketergantungan pada perantara ekonomi.

Politik Upah dan Kuasa Struktural dalam Rantai Nilai

Selisih nominal upah antara Binangatoa (Rp3.500) dan Kabirisi (Rp5.000 yang setelah dipotong Rp500 oleh perantara menjadi bersih Rp4.500) tidak dapat dibaca semata sebagai perbedaan harga pasar tenaga kerja belaka. Jika ditelaah melalui konsep kuasa struktural Eric Wolf, pola ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja secara tidak selalu tampak dalam menata relasi produksi dan akses terhadap sumber daya. Kehadiran pihak perantara dalam rantai kerja di Kabirisi menambah satu lapisan baru dalam struktur produksi, yang secara otomatis mengurangi nilai yang sampai ke tangan buruh perempuan di ujung rantai, tanpa disertai ruang negosiasi yang setara bagi mereka.

Posisi geografis, dengan demikian, turut menentukan seberapa besar kapasitas negosiasi ekonomi yang dimiliki perempuan. Perempuan di Binangatoa, karena letaknya yang berdekatan langsung dengan laut serta keterlibatan penuh mereka dalam seluruh tahap produksi, memiliki kendali yang lebih besar atas hasil kerja mereka sendiri dan menjalin relasi kerja yang lebih kolektif dan setara. Sebaliknya, perempuan di Kabirisi bekerja dalam sistem produksi yang lebih berjarak dari sumber daya utama maupun dari hasil akhir produksi, sehingga peran mereka menjadi terfragmentasi dan lebih terbuka terhadap praktik ekstraksi nilai oleh perantara. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kuasa dalam rantai nilai komoditas pesisir bukan semata soal siapa yang bekerja paling keras, melainkan juga soal di mana posisi seseorang berada dalam jaringan produksi dan distribusi—dimensi yang sering terlewatkan dalam analisis ekonomi konvensional yang lebih berfokus pada volume produksi dan harga pasar semata.

Dampak Ekonomi terhadap Kesejahteraan Keluarga Pesisir

Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam budidaya dan pengolahan rumput laut memberikan sumbangan nyata bagi perekonomian rumah tangga pesisir di Pangkep. Penghasilan tambahan yang diperoleh perempuan, baik dari upah pengikatan bibit, hasil olahan rumput laut, maupun keuntungan sebagai agen kecil, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, biaya pendidikan anak,

hingga pengadaan perlengkapan rumah tangga seperti televisi dan lemari es. Merujuk pada kerangka Gery Becker (1981) mengenai alokasi waktu dalam keluarga, kontribusi ini dapat dipahami sebagai strategi rasional keluarga untuk memaksimalkan pendapatan agregat melalui pendayagunaan seluruh tenaga kerja yang tersedia, termasuk tenaga kerja perempuan yang sebelumnya lebih banyak terserap ke ranah domestik tanpa upah.

Meski demikian, membaca fenomena ini semata melalui logika rasionalitas ekonomi keluarga berisiko menutupi dimensi ketimpangan gender yang menyertainya. Sejumlah kasus, seperti Ibu Rina yang menjadi penopang utama keluarga setelah suaminya berhenti bekerja, memperlihatkan bahwa kontribusi perempuan bukan sekadar pelengkap penghasilan suami, melainkan telah berubah menjadi penyangga utama ekonomi keluarga pada kondisi tertentu. Mengacu pada William Goode (2007) kesejahteraan keluarga tampak dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup para anggotanya; dalam konteks ini, sumbangan ekonomi perempuan pesisir Pangkep menjadi faktor penentu bagi ketahanan sosial-ekonomi keluarga. Jika dibaca melalui perspektif Todaro & Smith (2015) tentang pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan sumber daya manusia, kondisi ini juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi transformasi relasi gender yang lebih setara di tingkat rumah tangga, selama peran ganda yang mereka tanggung tidak dibiarkan menjadi beban struktural yang permanen.

Kendati demikian, penting dicatat bahwa meningkatnya kontribusi ekonomi perempuan ini belum tentu diikuti oleh berkurangnya beban domestik, maupun oleh kesetaraan akses terhadap pengambilan keputusan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi, seperti penentuan harga jual kepada agen besar atau akses terhadap modal usaha. Kondisi ini sejalan dengan pengamatan Firth (1951) bahwa peran ekonomi perempuan, meski bersifat strategis, kerap tetap berada di luar arus utama pengambilan keputusan ekonomi formal. Pola ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir Pangkep, sekalipun nyata dan cukup signifikan, masih berlangsung dalam kerangka struktural yang belum sepenuhnya setara.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan pesisir di Kabupaten Pangkep menjalankan peran ganda yang signifikan dalam siklus budidaya rumput laut, yakni memikul tanggung jawab domestik secara penuh sembari aktif terlibat dalam pembibitan, pengikatan, penjemuran, dan pengolahan hasil laut. Keterlibatan ini bukan sekadar bentuk bantuan terhadap penghasilan suami, melainkan telah menjadi unsur struktural yang menopang, bahkan pada sejumlah kasus menjadi penyangga utama, ekonomi keluarga nelayan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa pola keterlibatan perempuan tidak seragam, melainkan dibentuk oleh posisi ekologis permukiman terhadap laut. Perempuan di kawasan pesisir langsung (Binangatoa/Tanarajae) memperoleh keterlibatan penuh dalam siklus produksi melalui sistem gotong royong berupah yang relatif kolektif, sementara perempuan di kawasan yang lebih jauh dari laut (Kabirisi) hanya dilibatkan pada segmen pengikatan bibit melalui pasar tenaga kerja informal yang melibatkan perantara dan potongan upah. Dibaca melalui ekologi budaya Julian Steward dan kuasa struktural Eric Wolf, perbedaan ini menegaskan bahwa ruang ekologis turut membentuk struktur ekonomi, relasi kuasa, dan posisi tawar gender dalam rantai nilai komoditas pesisir.

Lebih jauh, temuan ini mengajak untuk membaca ulang dikotomi domestik-publik yang selama ini melekat pada citra perempuan pesisir. Alih-alih sekadar pelengkap dalam ekonomi rumah tangga,

perempuan Pangkep tampil sebagai aktor produksi sentral yang menentukan keberlangsungan rantai nilai rumput laut, sekaligus penopang ketahanan sosial-ekonomi keluarga pesisir secara keseluruhan. Namun demikian, kontribusi ekonomi yang signifikan ini belum sepenuhnya diimbangi oleh berkurangnya beban domestik atau oleh kesetaraan akses terhadap pengambilan keputusan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir Pangkep perlu dipahami sebagai proses yang masih berlangsung dalam kerangka struktural yang timpang.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami akses perempuan terhadap modal usaha dan pengambilan keputusan harga pada tingkat rantai pasok yang lebih tinggi, serta mengkaji bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi pesisir dapat dirancang secara lebih peka terhadap variasi ekologis-geografis sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Becker, G. S. (1981). *A treatise on the family*. Harvard University Press.
- Firth, R. (1951). Economic development in Polynesia. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 81(2), 201–225.
- Goode, W. J. (2007). *Sosiologi keluarga*. Bumi Aksara.
- Ischak, M. (2019). *Upaya perempuan pembudidaya rumput laut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pitusunggu Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode-metode baru* (Edisi ke-2). Penerbit Universitas Indonesia.
- Noor, J. (2011). *Metodologi penelitian: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Organization, F. and A. (2020). *Major tropical fruits market review*. FAO.
- Ortner, S. B. (1972). Is female to male as nature is to culture? *Feminist Studies*, 1(2), 5–31.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Kelautan dan perikanan dalam angka 2022*. Pusat Data, Statistik, dan Informasi.
- Rahmawati Tahir, H., & Hasmidar. (2021). Strategi pengembangan agribisnis budidaya rumput laut untuk meningkatkan produksi di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Jurnal Agribisnis*, 9(1), 33–45.
- Rosaldo, M. Z. (1974). Woman, culture, and society: A theoretical overview. In M. Z. Rosaldo & L. Lamphere (Eds.), *Woman, culture, and society* (pp. 17–42). Stanford University Press.
- Sasora, F., Nelson, N., Kusumastuti, H., Dewi, L. K., & Rauf, E. U. T. (2025). Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan koperasi di kelompok tani hutan SHK Lestari Desa Cilimus. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 771–777.
- Spradley, J. P. (1997). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Steward, J. H. (1955). *Theory of culture change: The methodology of multilinear evolution*. University of Illinois Press.
- Todoaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Wolf, Eric R. (1982). *Europe and the People Without History*. Berkeley: University of California Press.